

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dana Pendidikan merupakan salah satu komponen masukan Instrumental (*Instrumental Input*) yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah. Sumber-sumber Dana Pendidikan di antaranya Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Sumbangan, dan Orang Tua Siswa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yaitu “Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meringankan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Maka dari itu, sebagian dari dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) diperuntukan untuk Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

Faktor yang mengikuti dalam penyelenggaraan BOS adalah Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan sekolah. Seluruh bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan BOS bisa mengetahui

ketentuan yang dijalankan dalam rencana pelaksana BOS. Kelalaian penangkapan oleh pengelola mengakibatkan kendala dalam melaksanakan program BOS. (Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan).

Dalam upaya memenuhi komitmennya untuk menyediakan pendidikan dasar gratis, pemerintah membentuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS pada awalnya merupakan bentuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan semula untuk mempercepat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun (Wajar). Namun, mulai tahun 2009, pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS. Program BOS ke depan tidak hanya berperan dalam menjaga jumlah siswa, tetapi juga harus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Selain itu, peningkatan dana BOS yang cukup relevan dari tahun 2009 diharapkan dapat menjadikan BOS sebagai penyelenggara pendidikan dasar gratis. (Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biayapendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan

bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas program BOS adalah manajemen. Manajemen pada dasarnya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara sebagian aktivitas rutinitas manajerial dengan fungsi-fungsi lebih spesifik berkenaan dengan pelaksanaan program BOS.

Namun dengan adanya kebijakan Dana BOS ini justru memunculkan masalah baru seperti penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya masyarakat Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

Maka dari itu, dari penjelasan diatas penulis membuat laporan tugas akhir yang berjudul "***Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat***". Untuk dapat menambah pengetahuan tentang penyusunan dana bos dan sebagai pengimplementasian yang telah didapatkan serta juga pengetahuan bagi si pembaca nantinya.

## 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dibahas dalam tugas akhir adalah :

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Pelaporan Dana BOS di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaporan dana bos pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?

## 1.3. Tujuan magang

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan magang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Prosedur Penyusunan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui Pelaporan Dana BOS di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui dan mempelajari kendala yang dihadapi pada saat penyusunan dan pelaporan dana bos di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

## 1.4. Manfaat Magang

Dengan adanya kegiatan ini penulis dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, khususnya Prosedur Penyusunan dan

Pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian penulis juga bisa merasakan lingkungan kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan juga dengan adanya kegiatan ini penulis diharapkan bisa menambah wawasan terhadap Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.5. Metode Penulisan**

Data yang digunakan adalah dokumen Dana Bos di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.6. Tempat dan Waktu Magang**

Penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis, maka penulis berencana untuk melaksanakan kegiatan magang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.52, Jati Baru, Kec. Padang Timur Sumatera Barat Telp. (0751) 31513. Sedangkan waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai pada tanggal 6 juli 2020 sampai dengan selesai.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan Laporan Kerja Praktek ini terdiri dari lima bab, dimana masing masing bab terdiri dari :

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penelitian, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menerangkan tentang Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB III            GAMBARAN UMUM**

Membahas tentang gambaran umum Kota Padang, gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta hal-hal lain secara umum.

## **BAB IV            PEMBAHASAN**

Disini penulis akan membahas Prosedur Penyusunan Pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dana BOS, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana BOS.

## **BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Adalah penutup dari seluruh isi laporan yang di berikan kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang telah diuraikan dalam penyaluran Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.